

TESIS

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM PENGALIHAN DAN PEMBEBANAN
HARTA DEBITUR YANG BERSTATUS PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG (PKPU)**



Oleh :

FUAD IKRA MURAHMAN

NIM : 031924253060

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM PENGALIHAN DAN
PEMBEBANAN HARTA DEBITUR YANG BERSTATUS PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Fakultas
Hukum Universitas Airlangga**

OLEH:

FUAD IKRA MURAHMAN

NIM. 031924253060

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,

.....

Oleh

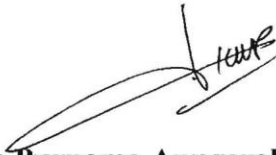
Dosen pembimbing 1:



Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.

NIP. 197304062003121002

Dosen pembimbing 2:



Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.

NIP. 198109152006041002

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Indira Retno Aryatie S.H.,M.H.

NIP.198003202005012002

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,

22 APRIL 2022

PANITIA PENGUJI TESIS:

Ketua : Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M.

NIP. 199009292022013101

Anggota : 1. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.

NIP. 197304062003121002

2. Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.

NIP. 198109152006041002

3. Agus Widyantoro, S.H., M.H.

NIP. 196208111989031001

4. Gianto Al Imron, S.H., M.H.

NIP. 197206101998021001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fuad Ikra Murahman, S.H.

NIM : 031924253060

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya' tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 10 Mei 2022

Yang membuat pernyataan,



Fuad Ikra Murahman, S.H.

NIM. 031924253015

MOTTO

Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain, Karena tak semua bunga tumbuh
dan mekar bersamaan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas seluruh berkat dan anugerahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **“KEWENANGAN NOTARIS DALAM PENGALIHAN DAN PEMBEBANAN HARTA DEBITUR YANG BERSTATUS PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)”** sebagai pemenuhan syarat untuk mendapat gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis baik selama kuliah maupun pada saat penyelesaian penulisan tesis ini antara lain :

1. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.d. beserta jajaran Wakil Dekan yang telah mendukung selama penulis menjalani perkuliahan
2. Kepada Dr. Indira Retno Aryatie S.H.,M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan dosen wali.
3. Kepada Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. dan Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M. selaku dosen pembimbing penulis yang telah banyak membantu penulis dengan memberikan bimbingan, meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam proses penulisan tesis ini. Terimakasih banyak atas segala ilmu yang telah berikan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
4. Kepada Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M. selaku ketua penguji, Agus Widyantoro, S.H., M.H. dan Gianto Al Imron, S.H., M.H.

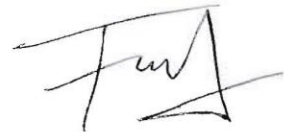
selaku tim penguji yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan serta saran dalam rangka penyempurnaan tesis ini.

5. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Pengajar pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas segala ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Kepada Bapak dan Ibu Staff Administrasi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, terutama untuk Ibu Emy yang selama ini banyak membantu dalam urusan administrasi sehingga penulisan tesis ini dapat berjalan dengan lancar.
7. Kepada orang tua penulis, Ayah Bunaya Fauzi Jouhar dan Ibu Nur Tsalits Hamidah, terimakasih atas segala cinta, kasih sayang dan dukungan yang diberikan dalam proses penulisan tesis ini.
8. Kepada Paman saya Zahrullah Amrozi Jouhar, Paman Arif Baharudin Bibi Ariani Sulistyorini, Bibi Khoirotun Nisak, dan Paman Ahmad Mahyudin Subchi yang selama ini menemani, memberikan saran, dan atas segala bantuan hingga penulisan tesis ini selesai.
9. Kepada teman-teman keluarga besar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala bantuan yang diberikan selama penulis menjalani perkuliahan.
10. Kepada teman dan sahabat penulis Ilham Dwi Budiadi, Idha Racy Rosalia Hadi, Susan Elseline Widjaja, Hendrik Ari Wibowo, Muhammad Fatchur Rozi, Mohamad Rizal Fahmi, Faizhol Nur Rohman, Dedy Mahsudi, Novi

Eka Yunita, Aceng Wiantono, Sarah Mirna Maharani, Ricky Andrean, Ghozy Rafli Hasani, Abdul Rosid Novianto, Iqbal Ahmad Dhuha, Mohammad Iqbal Fikri Arinda Pradhana, Jovita Amanda Suryanto, Mega Tri Hermawati, dan semua teman yang selama ini menemani, memberikan saran, menjadi tempat berkeluh kesah selama penulisan tesis ini.

Surabaya, 13 Januari 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fuad', with a stylized, sweeping flourish extending from the end.

Fuad Ikra Murahman, S.H.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya ketidak mampuan debitur untuk membayar utang. Ketidak mampuan debitur dalam memenuhi kewajiban membayar utang membuat dalam situasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam masa PKPU, debitur ingin memenuhi kewajibannya dengan melakukan pengalihan dan pembebanan hartanya. Dalam peralihan dan pembebanan harta debitur yang berstatus dalam PKPU, tentu Notaris memiliki peran penting di dalamnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana kewenangan Notaris dalam membuat akta pengalihan dan pembebanan harta debitur yang berstatus dalam PKPU, serta untuk mengetahui tanggungjawab Notaris dalam membuat akta tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian didasarkan pada peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta berupa akta jual beli, akta hibah, akta fidusia dan akta gadai.. Noatris bertanggungjawab secara perdata apabila kesalahan ada pada Notaris dalam membuat akta, sedangkan jika yang melakukan kesalahan berupa perbuatan melanggar hukum dilakukan oleh para pihak yang menghadap, maka Notaris tidak memiliki tanggungjawab untuk akta tersebut.

Kata Kunci: PKPU, Notaris, Tanggungjawab Notaris

ABSTRACT

The background of this research is the debtor's inability to pay debts. Debtor's inability in fulfilling their responsibility to pay debts deepen the situation in Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). In PKPU, debtor wants to fulfill their responsibility by doing diversion and imposition of their asset. Notary has an important part in diversion and imposition of debtor's asset in PKPU. The purpose of this research is to analyze Notary's authority in making akta of transfer and assignment of assets debtor that is in PKPU and to know the responsibility of Notary in making the act.

This research uses juridical normative method, which is a research that is based on the laws and regulations, specifically Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). The result of this research shows that Notary has an authority to make acts such as Fiduciary deed, Deed of pawn, Deed of sale, Deed of grant. Notary is responsible if there is an error made by the notary in making the act. However, if the error in the form of an act of breaking the law are made by the client's, the notary has no responsibility in such acts.

Keywords : PKPU, Notary, Notary Responsibilities

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Republik Indonesia 1945

Burgelik Wetboek (BW)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Sebagaimana
Diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENETAPAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan	10
1.4 Manfaat	10
1.5 Metode Penelitian	11
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	13
BAB II KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA TERHADAP HARTA DEBITUR YANG BERSTATUS PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)	15
2.1 Fungsi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	15
2.2 Akibat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	18

2.3 Peralihan Harta Debitur yang berstatus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	23
2.4. Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pengalihan Harta Debitur.....	30
BAB III TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENGALIHAN DAN PEMBEBANAN HARTA DEBITUR BERSTATUS PENUNDAAN KEWAJIBAN UTANG (PKPU)	41
3.1 Hubungan Hukum dan Para Pihak Dalam Peralihan Dan Pembebanan Harta Debitur Yang Bertatus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	41
3.2. Pihak yang Dirugikan Akibat Terbitnya Akta Pengalihan dan Pembebanan Harta Debitur yang Bertatus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	46
3.3 Tanggungjawab Perdata Notaris	50
BAB IV PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	56
Daftar Bacaan	